Sistem Pendidikan Nasional Dalam Pembelajaran

Nur Eka Saputri

STAI DDI Makassar

Email: nurekasaputri0906@gmail.com

Dosen pembina: Muhammad Arsyam S.pd.I,M.pd

<p>Makalah History: Dibuat: 12, 10, 2021 Dipresentasikan: 14, 11, 2021</p> <p>Keyword:</p> <p>Sistem, Pendidikan, Nasional, Pembelajaran</p> <p>*Correspondence Address: nurekasaputri0906@gmail.com arsyam0505@gmail.com</p>	<p>Abstract: Artikel Ini akan membuat beberapa penjelasan dari pendidikan seperti sistem pendidikan Nasional, fungsi dan tujuan pendidikan, Visi dan misi pendidikan nasional, jalur, jenjang, dan jenis program pendidikan, pendidikan formal, non formal, informal, dan upaya pengembangan sistem nasional. artikel ini dibuat semata-mata hanyalah sebuah tugas yang di berikan oleh dosen dan sebagai perantara kepada teman teman untuk mendapatkan ilmu. penjelasan selanjutnya akan di jelaskan di bawah ini.</p>
---	---

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berkembang dan mengalami berbagai kemajuan yang pesat. Bangsa Indonesia sebagai salah satu negara berkembang tidak akan bisa maju selama tidak ada perbaikan pada kualitas sumber daya manusianya. Kualitas hidup bangsa akan meningkat jika ditunjang dengan sistem pendidikan yang mapan. Dengan sistem pendidikan yang mapan, akan sangat mungkin bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan sumber daya Indonesia yang mampu berpikir tanggap, kritis, dan kreatif.

Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa negara kita ingin mewujudkan masyarakat yang cerdas. Untuk mencapai bangsa yang cerdas, harus terbentuk masyarakat belajar. Masyarakat belajar dapat terbentuk jika memiliki kemampuan dan keterampilan mendengar dan minat baca yang besar. Apabila membaca sudah merupakan kebiasaan yang membudaya, maka jelas buku tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari dan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi.

Pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat. Setiap manusia membutuhkan pendidikan, sampai kapan dan dimanapun ia berada. Pendidikan sangat penting artinya, sebab

PEMBAHASAN

A. Pengertian Sistem Pendidikan Nasional

Sistem merupakan suatu perangkat yang saling bertautan, yang tergabung menjadi suatu keseluruhan, sedangkan pendidikan merupakan suatu usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD negara republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan zaman. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa sistem pendidikan nasional adalah satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh yang saling bertautan dan berhubungan dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan pendidikan nasional secara umum.

Sistem pendidikan nasional Indonesia disusun berlandaskan kepada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasar pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai kristalisasi nilai-nilai hidup bangsa Indonesia. Dalam UU No.20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 3 dikemukakan bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

B. Fungsi dan Tujuan Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pendidikan nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

C. Visi dan Misi Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan nasional itu mempunyai visi yaitu terwujudnya sistem pendidikan nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Adapun misi dari pendidikan nasional tersebut yaitu:

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan

yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.
3. Meningkatkan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral.
4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global.
5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI.

D. Jalur, Jenjang, dan Jenis Program Pendidikan Nasional

Dalam sistem pendidikan nasional, peserta didiknya adalah semua warga negara, artinya setiap satuan pendidikan yang ada harus memberikan kesempatan memberi kesempatan menjadi peserta didiknya kepada semua warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan kekhususannya, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, suku bangsa dan sebagainya Hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 31 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi “ Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”, dan “bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Dari amandemen keempat UUD 1945, pasal tersebut mengarahkan fungsi konstitusional dari diselenggarakannya satu sistem pendidikan nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional pada Pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Adapun jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

1. Pendidikan Formal Pendidikan Dasar

- Sekolah dasar (SD)
- Madrasah Ibtidaiyah (MI)
- Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- Madrasah Tsanawiyah (MTs)

a. Pendidikan Menengah

- Sekolah Menengah Atas (SMA)
- Madrasah Aliyah (MA)
- Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
- Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)

b. Pendidikan Tinggi

- Akademi, yakni perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan teknologi dan kesenian tertentu.
- Politeknik, yakni perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.
- Sekolah tinggi, yakni perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik atau profesional dalam suatu disiplin ilmu pada bidang tertentu.
- Institut, yakni perguruan tinggi yang terdiri sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik/profesional dalam sekelompok disiplin ilmu yang sejenis.
- Universitas, yakni perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik/profesional dalam sekelompok disiplin ilmu tertentu.

Oleh karena itu dalam menjalankan manajemen atau pengelolaan harus mampu memilih atau mendelegasikan kepada orang yang tepat dalam artian kemampuan dan ketrampilannya. Salah satu indikasi keberhasilan seseorang dalam menjalankan manajemen terletak bagaimana memilih dan mempercayai orang lain.

Mengenyam pendidikan pada pendidikan formal yang diakui oleh lembaga pendidikan negara adalah sesuatu yang wajib dilakukan di Indonesia. Mulai dari kalangan yang miskin sampai yang kaya itu harus bersekolah, minimal 9 tahun lamanya hingga lulus SMP.

Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah yang lahir dan berkembang secara efektif dan efisien dari pemerintah untuk masyarakat merupakan perangkat yang berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menjadi warga Negara.

2. Pendidikan Non Formal

Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Contoh pendidikan nonformal yaitu:

- a. Lembaga kursus
- b. Lembaga penelitian
- c. Kelompok belajar
- d. Pusat kegiatan belajar masyarakat

Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintahan daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

3. Pendidikan Informal

Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Jenis program pendidikan terdiri atas:

1. Pendidikan Umum. Merupakan pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan.
2. Pendidikan Kejuruan. Merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang pekerjaan tertentu.
3. Pendidikan Luar Biasa. Merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik/mental.
4. Pendidikan Kedinasan. Merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai atau calon pegawai suatu departemen pemerintah atau lembaga pemerintah non departemen.
5. Pendidikan Keagamaan. Merupakan pendidikan khusus yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat melaksanakan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama.

E. Upaya Pengembangan Sistem Pendidikan Nasional

Untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional dilakukan pembaruan-pembaruan yang meliputi landasan yuridis, kurikulum dan perangkat penunjangnya, struktur pendidikan, dan tenaga kependidikan.

1. Pembaruan Landasan Yuridis

Pembaruan landasan yuridis berhubungan dengan hal-hal yang bersifat mendasar (fundamental) dan bersifat prinsipal. Dikatakan demikian

karena landasan yuridis mendasari semua kegiatan pelaksanaan pendidikan dan mengenai hal-hal yang penting seperti komponen struktur pendidikan, kurikulum, pengelolaan, pengawasan, dan ketenagaan.

2. Pembaruan Kurikulum

Ada dua faktor pengendali yang menentukan arah pembaruan kurikulum, yaitu yang sifatnya mempertahankan dan yang mengubah. Yang termasuk faktor yang pertama adalah landasan filosofis, yaitu falsafah bangsa Indonesia, Pancasila dan UUD 1945 dan landasan historis yang mencakup unsur-unsur yang menguasai hajat hidup orang banyak dari dulu sampai sekarang. Yang termasuk faktor yang kedua adalah landasan sosial berupa kekuatan-kekuatan sosial di masyarakat, dan landasan psikologis yakni cara peserta di dalam belajar.

3. Pembaruan Pola Masa Studi

Pembaruan pola masa studi termaksud pendidikan yang meliputi pembaruan jenjang dan jenis pendidikan serta lama waktu belajar pada satuan pendidikan. Perubahan pola masa studi sebagai suatu tanda adanya pembaruan pendidikan berupa penambahan/pengurangan masa studi.

4. Pembaruan Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan adalah tenaga yang bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola serta memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. Pembaruan terhadap komponen tenaga kependidikan dipandang sangat penting karena pembaruan pada komponen-komponen lain tanpa ditunjang oleh tenaga-tenaga pelaksana yang kompeten, tidak akan ada artinya. Tenaga lain selain guru adalah pustakawan, laboran, konselor, teknisi sumber belajar, dan lain-lain

PENUTUP

Demikian yang dapat kami tuliskan, tentunya masih banyak kekurangan dalam penulisan makalah ini karena terbatasnya pengetahuan dan referensi. Kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan untuk memperbaiki makalah penulis kedepannya.

Semoga makalah ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca yang budiman.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. (2017). Membudayakan literasi dengan program 6M di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar*, 3(1), 42-52.
- Ahmadi, Abu & Nur Uhbiyati. 2001. Ilmu Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arsyam, M. (2020). Manajemen pendidikan islam.
- Arsyam, M., & M. Yusri. (2021). Kebijakan Sistem Administrasi Kemitraan Sekolah Terhadap Masyarakat. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 10-17. Diambil dari <http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi/article/view/8>
- Eko, Triyanto, dkk, 2013, Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Pemanfaatan Media Pembelajaran sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Proses Pembelajaran, Universitas Negeri Surakarta, Vol. 1 No. 2 Hal. 226-238, <http://jurnal.pasca.uns.ac.id>, 11 November 2014.
- Gandhi H.W., Teguh Wangsa. 2013. Mazhab-Mazhab Filsafat Pendidikan. Yogyakarta: Ar-Ruz Media.
- Hasbullah. 2013. Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ihsan, Fuad. 2013. Dasar-Dasar Kependidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kadir, Abdul, dkk. 2012. Dasar-Dasar Pendidikan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suwarno, Wiji. 2006. Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. Yogyakarta: Ar-Ruz Media.
- Takdir, M. 2012. Revitalisasi Pendidikan Berbasis Moral. Yogyakarta: Ar-Ruz Media.
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS. 2012. Penyelenggaraan Pendidikan serta Wajib Belajar. Bandung: Citra Umbara.
- Paris, S., Jusmawati, J., Alam, S., Jumliadi, J., & Arsyam, M. (2021). UPAYA PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR SISWA MELALUI MODEL KOOPERATIF DENGAN PENDEKATAN EKSPERIMEN PADA PEMBELAJARAN IPA DI KELAS V SD INPRES BANGKALA II KOTA MAKASSAR. *Bina Gogik: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 8(1).